

Konflik Bersenjata di Idlib: Pertarungan Antar-Kepentingan Nasional

Fany Anggun Abadi, Ali Muhammad, Takdir Ali Mukti

Prodi Hubungan Internasional Program Magister

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

e-mail : anggunabadi1998@gmail.com

Abstract

Idlib is a province in northwestern Syria that borders Turkey. Since 2015, the Syrian government has lost control of the province as rebel militias have occupied it. Entering the 10th year of the Syrian conflict, Idlib is the last stronghold of rebel militias that have the support of Turkey, the United States, several Western countries and the Gulf. On the other hand, the Syrian government, with the help of Russia and Iran, is also trying to take back control over Idlib. Each state actor in this conflict, Syria and foreign countries, has national interests. This article aims to describe the national interests of some of these state actors, especially Syria, which wants to maintain its country's sovereignty dan security. The research was conducted using qualitative methods through literature and mass media. Researchers found that the conflict between national interests caused the conflict in Idlib to drag on, and no solution has been found.

Keywords: *Idlib, national interests, national security, Turkiye, Syria, United States of America*

Abstrak

Idlib adalah sebuah provinsi di barat laut Suriah yang berbatasan dengan Turki. Sejak tahun 2015, pemerintah Suriah kehilangan kendali atas provinsi ini karena diduduki oleh milisi-milisi pemberontak. Setelah memasuki tahun ke-10 konflik Suriah, Idlib menjadi pangkalan terakhir milisi pemberontak yang mendapatkan dukungan dari Turki, Amerika Serikat, beberapa negara Barat, serta Teluk. Di sisi lain, pemerintah Suriah dengan bantuan Rusia dan Iran juga terus berusaha mengambil kembali kontrol atas Idlib. Masing-masing aktor negara dalam konflik ini, baik Suriah maupun negara asing memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan kepentingan nasional beberapa

aktor negara tersebut, terutama Suriah yang ingin menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasionalnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dan media massa. Peneliti menemukan bahwa adanya pertarungan antarkepentingan nasional itu menyebabkan konflik di Idlib berlarut-larut dan belum ditemukan solusinya.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Idlib, keamanan nasional, kepentingan nasional, Turki, Suriah

Pendahuluan

Provinsi Idlib terletak di barat laut Suriah, dan membentang di sepanjang bagian perbatasan Suriah-Turki. Mulai Maret 2015, pemerintah Suriah kehilangan kontrol atas provinsi ini setelah milisi koalisi Jaysh Al Fath mengambil alih kota Idlib, lalu berlanjut pada pendudukan atas kota-kota dan desa-desa lainnya. Koalisi Jaysh Al Fath beranggotakan, antara lain, milisi Ahrar Al Sham, Failaq Al Sham, dan Jabhat Al Nusra (Alkharpotly, 2019). Milisi-milisi pemberontak yang berkumpul di Idlib adalah kelompok Islam ekstremis atau radikal. Salah satu kelompok dominan di kawasan itu adalah Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) -nama baru dari Jabhat Al Nusra- yang berafiliasi dengan Al Qaeda. Idlib kemudian menjadi tempat perlindungan milisi-milisi pemberontak yang kalah di wilayah-wilayah lain di Suriah. Sebelumnya, ada beberapa tempat di Suriah yang menjadi kubu terakhir milisi pemberontak seperti Homs, Ghouta Timur, Deraa, dan Aleppo; namun kini mereka semua terkonsentrasi di Idlib sehingga Idlib menjadi penyebab perang Suriah berlarut-larut hingga kini (Salaymah & Acun, 2018:2).

Pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya bersama-sama menginginkan perubahan kepemimpinan di Suriah. Inggris, Perancis, Arab Saudi, Yordania, Lebanon, Qatar, dan Turki adalah bagian dari kelompok sekutu Amerika yang sangat aktif mendukung kelompok oposisi. Pada 2013, mereka menyediakan dana \$60 juta untuk memungkinkan kelompok pemberontak itu melancarkan serangan terhadap pasukan pemerintah (Harmiyati, 2018). Selain itu, AS dan sekutunya juga berupaya memberikan sanksi hukum internasional melalui badan-badan PBB dengan menggunakan posisinya masing-masing di dalam PBB. Namun di sisi lain, cara ini menemui kendala karena Rusia dan China memveto setiap resolusi yang dianggap merugikan pemerintah Suriah. Campur tangan asing di tanah Suriah tidak diinginkan oleh kedua negara ini, meski Rusia sendiri memiliki pangkalan militer di Tartus (Harmiyati, 2018).

Artikel ini akan membahas mengenai upaya militer yang dilakukan Suriah untuk mengambil kembali kontrol atas Idlib. Dalam upaya ini, selain kepentingan Suriah, kepentingan asing juga terlibat. Antara lain, Rusia sebagai sekutu utama Suriah ingin

merebut kembali Idlib dari tangan milisi pemberontak karena Idlib merupakan wilayah yang menghubungkan Latakia dan Tartus. Rusia memiliki pangkalan udara Hmeimim di Latakia dan fasilitas angkatan laut di Tartus (Mudore & Safitri, 2019:7).

Seperti telah disinggung sebelumnya, sejak awal AS berkepentingan untuk menggulingkan pemerintahan Assad sehingga AS dan sekutunya memberikan dukungan besar-besaran untuk para pemberontak. Seiring dengan upaya AS itu, bantuan dari Rusia dan Iran untuk pemerintahan Suriah juga terus berlanjut. Atas bantuan Rusia dan Iran, pada tahun 2016, pemerintahan Bashar Al Assad berhasil mengalahkan milisi pemberontak di berbagai kawasan dan mendapatkan kendali lagi atas daerah-daerah tersebut. Mereka mulai menyerah pada tekanan dari peran Rusia dan Iran. Dukungan AS untuk kelompok oposisi Suriah, tentu saja dapat diasumsikan bahwa AS sedang berusaha memperoleh tujuan politiknya untuk memberikan pengaruh atas Suriah, yang selama ini disamakan dengan "duri dalam daging" untuk Amerika Serikat atas kebijakannya di Timur Tengah, khususnya yang berkaitan dengan Israel dan Iran. Dalam hal ini, Amerika Serikat melihat perlunya mendukung milisi-milisi bersenjata di Suriah yang saat ini terkonsentrasi di Idlib.

Aktor lain yang terlibat di Idlib secara signifikan adalah Turki. Posisi Idlib yang berbatasan dengan Turki tentu berpengaruh pada negara tersebut. Alatas (2019) menjelaskan fenomena konflik perbatasan Suriah-Turki yang memiliki implikasi multidimensi seperti ekonomi, sosial dan politik. Dijelaskan, kedatangan pengungsi dari Suriah membuat warga Turki resah dan menggerogoti stabilitas ekonomi dan sosial Turki, sehingga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Erdogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Turki terhadap pengungsi Suriah, yang awalnya berbasis pada *lingkungan nol* dan mengutamakan kesamaan identitas dengan Muslim, segera berubah bahwa para pengungsi berdampak langsung pada keamanan nasional Turki. Pada Februari 2020, Turki melakukan Operasi Perisai Musim Semi di Idlib utara adalah untuk mencegah pasukan Suriah mengambil alih Idlib agar para milisi bersenjata dan warga pengungsi antipemerintah mengungsi ke Turki (Van Veen, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Idlib, antara lain Salaymeh & Acun (2018) yang membahas dampak Perjanjian Sochi terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Idlib. Idlib telah digunakan oleh Turki, Rusia, dan Iran sebagai zona de-eskalasi militer yang disepakati di mana senjata berat, tank, mortir, dan kekerasan fisik oleh angkatan bersenjata dilarang. Sementara itu, Mudore dan Safitri (2019) dalam artikel jurnalnya menyebut bahwa motif keterlibatan negara-negara asing dalam konflik Suriah adalah kepentingan ekonomi dan perebutan pengaruh. Salari, et.al. (2022) menulis bahwa setiap aktor dalam konflik Suriah berupaya untuk mengurangi

kekuatan dan pengaruh lawan mereka, sambil mempertahankan dan mempromosikan kepentingan nasional mereka.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara lebih rinci kepentingan nasional masing-masing aktor, terutama kepentingan nasional Suriah sendiri. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dokumen, halaman atau website resmi tentang topik yang dibahas.

Konsep Kepentingan Nasional

Istilah kepentingan nasional memiliki banyak tafsiran. Salah satunya adalah bahwa kepentingan nasional adalah akumulasi dari semua kepentingan subnasional tertentu yang ditemukan dalam masyarakat. Keseluruhan kepentingan masyarakat satu sama lain akan saling bersaing, memunculkan tuntutan atas sistem politik dan upaya tawar-menawar. Asumsinya, bila dilakukan tindakan politik untuk mengelola dengan adil berbagai kepentingan ini, akan tercapai suatu kepentingan bersama (Clinton, 1994: 25-26). Ada pendapat yang mengatakan bahwa kepentingan nasional akan bergantung pada jenis rezim negara tersebut, misalnya, negara demokratis akan memiliki kepentingan nasional yang berbeda dengan rezim dictator (Clinton, 1994:30). Namun, pendapat ini dibantah oleh Morgenthau. Menurutnya, konsepsi kepentingan nasional adalah tunggal, seolah seperti mata uang bersama dalam hubungan internasional. Karena, jika konsepsi kepentingan nasional ini berbeda-beda, tentu para analis tidak punya pegangan dalam menganalisis keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang sedang mereka teliti, dan para diplomat tidak memiliki kesamaan dimensi saat bernegosiasi. Morgenthau memandang bahwa konsep kunci dari kepentingan nasional adalah kekuasaan (*power*) sebagai kategori objektif yang valid secara universal. Dalam kondisi anarkhi, ketika tidak ada pemerintahan dunia yang melindungi secara efektif, negara-negara akan berupaya mempertahankan atau menambah kekuatan mereka untuk melindungi kepentingan nasional mereka, dan kepentingan nasional yang utama adalah kemerdekaan dan keamanan nasional (Clinton, 1994:31-32).

Konsep kepentingan nasional itu sendiri merupakan tujuan yang harus dicapai bangsa secara teratur melalui pemerintahan. Menurut Hans J. Morgenthau, konsep kepentingan nasional dirumuskan bersama oleh suatu negara dengan landasan rasional, dimana di dalamnya negara memiliki kewajiban untuk melindungi identitas fisik, politik, dan kebudayaan negara tersebut dari gangguan negara lain. Atas dasar keinginan untuk melindungi identitas fisik (yaitu integritas teritorial), identitas politik (mempertahankan pemerintahan), dan identitas budaya (seperti bahasa dan sejarah), negara akan menggunakan *power*-nya (Nurhaliza, 2019, hal. 20). Sebagaimana ditulis Morgenthau,

"Keamanan nasional, adalah landasan dari kepentingan bangsa, yang dipertahankan dengan diplomasi yang memadai dan penuh kekuatan tanpa kompromi" (dalam Clinton, 1994:32).

Latar Belakang Konflik Suriah

Konflik Suriah terjadi di masa Arab Spring, dimana banyak negara-negara Arab yang dilanda demonstrasi warga menentang pemerintahan masing-masing. Saat aksi demo di Suriah dimulai tahun 2011, Suriah dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad. Ia menjadi presiden Suriah sesudah kepemimpinan ayahnya, Hafez al-Assad. Meskipun Bashar dipilih sebagai presiden melalui proses pemilu, namun keterikatan hubungan keluarga antara ia dan presiden sebelumnya, yaitu ayahnya, membuat rezim Suriah dianggap tidak demokratis dan sebagian warga menginginkan perubahan. Pemerintahan Hafez atas Bashar al-Assad berlangsung lebih dari 40 tahun. Selama masa pemerintahan Hafez Assad, terjadi peningkatan Human Development Indeks (HDI). Misalnya, tahun 1990, indeks HDI Suriah adalah 0,562, dan tahun 2000 ketika Bashar Assad naik menjadi presiden, indeks HDI Suriah adalah 0,587 dan angka ini terus meningkat, menunjukkan adanya kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sebelum perang, tahun 2010, indeks HDI Suriah adalah 0,660. Namun, akibat dilanda perang selama lebih 10 tahun, di tahun 2021 indeks HDI Suriah menurun menjadi 0,577 dan berada di peringkat 150 dari 182 negara (UNDP, 2021).

Aksi-aksi demo masyarakat Suriah pada tahun 2011 menuntut adanya demokratisasi yang lebih luas dan reformasi. Namun situasi berubah menjadi perang asimetris di mana muncul milisi-milisi bersenjata yang berafiliasi dengan Al Qaida atau Ikhwanul Muslimin yang angkat senjata melawan tentara nasional Suriah. Milisi-milisi bersenjata itu umumnya menyatakan diri sedang melakukan jihad demi mendirikan pemerintahan Islam (khilafah) di Suriah. Perubahan target gerakan massa ini (dari tuntutan demokratisasi berubah menjadi khilafah) dideklarasikan tanggal 20 November 2012 oleh kelompok jihad terkuat saat itu, Jabhah Al Nusrah, bersama milisi-milisi lainnya dengan mendirikan Brigade Koalisi Pendukung Khilafah (Yulianti & Sumadinata, 2018).

Konflik di Suriah bukanlah persoalan yang terisolasi, melainkan konflik yang sudah terinternasionalisasi. Hal ini terlihat dari terlibatnya negara-negara asing dalam konflik ini. SNCORF (The *Syrian* National Coalition for Opposition and Revolutionary Force) didirikan di Doha (Qatar) yang diklaim sebagai perwakilan resmi oposisi Suriah. SNCORF didirikan dengan disponsori AS, Qatar, dan negara-negara Teluk, dengan anggotanya sekitar 60 orang, di antaranya beberapa pemberontak Suriah yang berbasis

di dalam maupun di luar negeri, termasuk juga tokoh-tokoh militer yang membelot. Kepala SNCORF yaitu Moaz al-Khatib, seorang ulama Ikhwanul Muslimin. Misi pembentukannya adalah untuk menggantikan pemerintah Bashar al-Assad, mendukung militer, dengan mencari dukungan keuangan, logistik, dan dukungan lainnya (Herlambang dan Wulan, 2020).

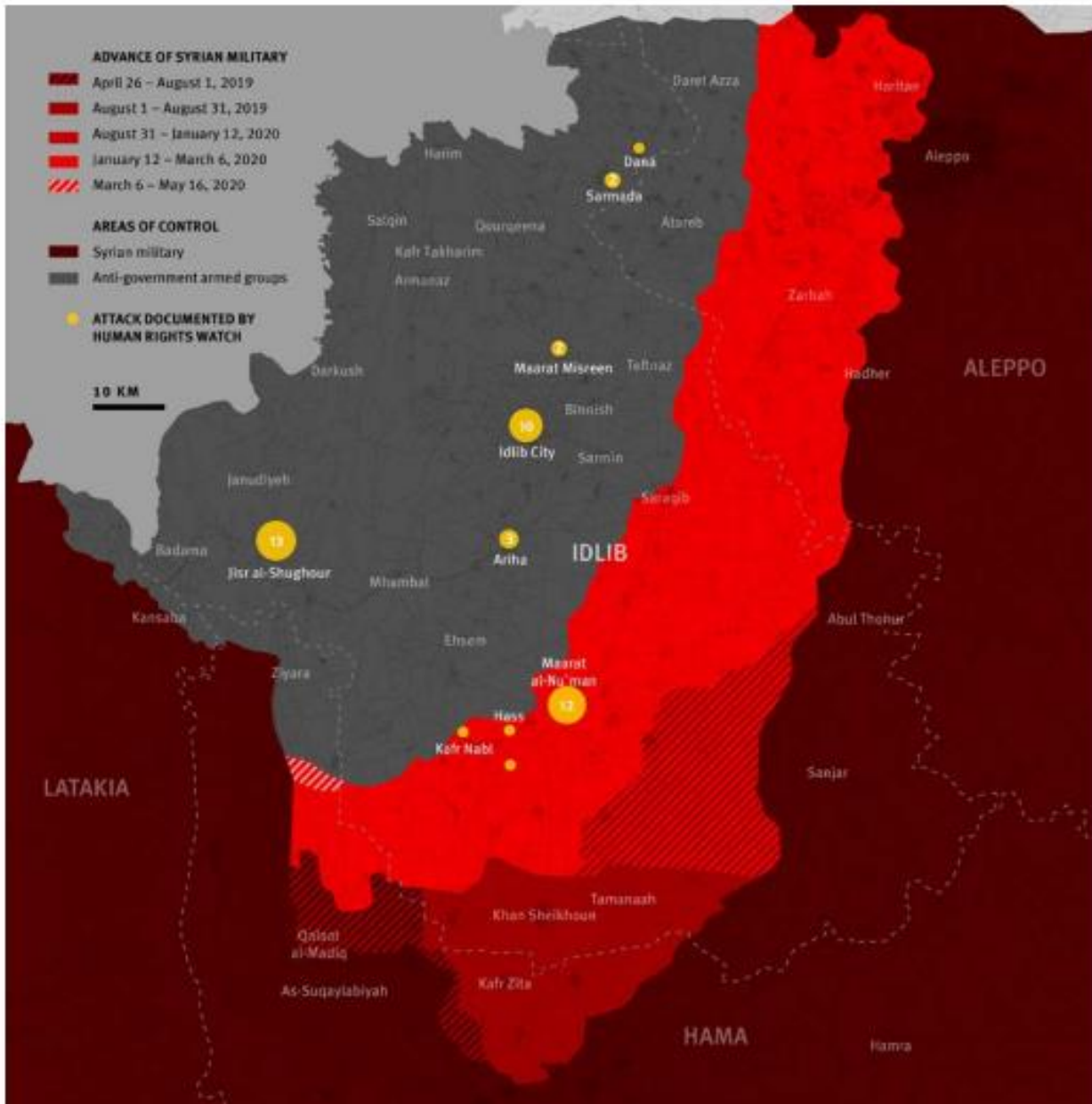
SNCORF menggalang dukungan untuk Free Syrian Army (FSA) yang mendapat bantuan dari berbagai negara sponsor, termasuk Turki, Arab Saudi dan Qatar. Pada bulan Agustus 2012, dilaporkan sebenarnya AS dan Inggris juga memberi bantuan dan pelatihan. Anggota FSA sebagiannya adalah milisi asing, antara lain dari Lebanon, Aljazair, Tunisia, Yordania dan Arab Saudi. FSA beraksi di seluruh Suriah, baik di perkotaan ataupun pedesaan. Milisi ini beroperasi di barat laut (Idlib dan Aleppo), wilayah tengah (Homs, Hama dan Rastan), wilayah pesisir di sekitar Latakia, selatan (Dara dan Horan) dan timur (Deir ez-Zor dan Abu Kamal), serta wilayah Damaskus. Pemusatan terbesar pasukan ini ada di wilayah tengah (Homs, Hama dan sekitarnya), dimana sembilan batalyon beroperasi (Herlambang dan Wulan, 2020).

Milisi lainnya yang angkat senjata di Suriah adalah Front Al Nusra (Jabhat Al Nusra) yang didirikan Abu Muhammad al-Jolani. Milisi ini mencapai sukses cepat di medan perang dan menarik pendukung baru dari dalam maupun dari luar Suriah. Pada 20 November 2012, Front Nusra bersama beberapa milisi pemberontak lainnya mendeklarasikan koalisi yang mendukung berdirinya kekhalifahan di Suriah. Jabhat al-Nusra adalah afiliasi dari Al Qaida Irak atau Islamic State of Iraq yang dipimpin Al Baghdadi. Al Baghdadi kemudian ingin menyatukan dua milisi itu dengan nama baru Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang bersumpah setia kepada pemimpin tertinggi Al Qaida, Ayman Al Zawahiri. Al Zawahiri secara resmi memisahkan ISIS dari Al Qaeda pada Februari 2014 dan menjadikan Jabhat al-Nusra satu-satunya perwakilan Al Qaeda di Suriah (Herlambang dan Wulan, 2020). Kehadiran Front Al Nusra semakin menunjukkan kalau konflik di Suriah lebih dari sekedar konflik internal. Milisi-milisi pemberontak itu berasal dari berbagai negara. Menurut laporan lain, sekitar 8.500 pejuang asing bergabung dengan pasukan oposisi Suriah antara 2011 dan 2013, 1.900 di antaranya dari Eropa Barat. Pada Januari 2015, jumlah ini meningkat menjadi 19.000 kombatan.

Berikut ini rangkuman singkat pihak-pihak yang berada di Idlib, menurut Human Rights Watch (2020):

-Free Syrian Army (FSA): FSA mulai dibentuk tahun 2011 sebagai milisi bersenjata yang memayungi berbagai faksi milisi pemberontak, FSA didukung oleh Turki dan sejak tahun 2019 di-reorganisasi menjadi "the Syrian National Army" (SNA).

-Harakat Nour al-Din al-Zinki: milisi yang awalnya bergabung dengan FSA dan aktif di Aleppo barat. Sempat bergabung dengan Hay'at Tahrir al-Sham tahun 2017, lalu berpisah lagi di tahun 2018.



Peta area kontrol di dalam dan sekitar Provinsi Idlib. Sumber: : Syrian Network of Human Rights. Peta dibuat oleh: Human Rights Watch 2020

-Hay'at Tahrir al-Sham (HTS / *Levant Liberation Committee*): dibentuk 2017, merupakan alih nama dari *Jabhat Fateh al-Sham*, dan sebelumnya bernama *Jabhat al-Nusra (Nusra Front)*. PBB, AS, dan Turki secara resmi pada tahun 2018 menyatakan bahwa HTS adalah organisasi teroris asing (*foreign terrorist organization*) yang berafiliasi dengan al-Qaeda. HTS menyatakan mereka sudah memisahkan diri dari Al Qaeda.

- *Hurras al-Deen*: mereka awalnya anggota *Jabhat al-Nusra* (lalu beralih jadi HTS) yang masih setia pada Al Qaida dan membentuk kelompok sendiri.

-*National Liberation Front (NLF)*: milisi bersenjata yang awalnya bergabung dengan *Free Syrian Army*. NLF dibentuk di barat laut Suriah pada Mei 2018 dan kini menjadi anggota SNA (*Syrian National Army*) yang dibentuk Turki.

-*Syrian Civil Defense* (juga dikenal dengan nama "White Helmets"): dibentuk tahun 2014, bergerak sebagai petugas medis di kawasan yang tidak dikontrol pemerintah Suriah (di kawasan yang dikuasai milisi pemberontak).

- *Syrian National Army (SNA)*: milisi bersenjata yang didukung Turki, dibentuk 2019, terdiri dari koalisi berbagai faksi, antara lain *Free Syrian Army* dan *the National Liberation Front*.

Kepentingan Nasional Aktor-Aktor Negara di Suriah

Kepentingan Nasional Amerika Serikat

Bagi Amerika Serikat, kedekatan Suriah dengan Iran dan Rusia merupakan ancaman. Terutama, karena Suriah dan Iran memiliki satu kepentingan bersama, yaitu melawan Israel. Terlepas dari hubungan baik yang terjalin antara Amerika Serikat (AS) dan Iran sebelum Revolusi Islam Iran 1979, hari ini peta politik antara kedua negara telah berbalik. Sejak 1980-an, Iran dan AS telah memutuskan hubungan diplomatik hingga hari ini dan keduanya selalu berhadapan dalam konflik tidak langsung. Konflik Suriah juga menjadi konflik tidak langsung di antara keduanya, dimana AS memberikan dukungan kepada milisi-milisi bersenjata di Suriah untuk menggulingkan rezim, sebaliknya Iran memberikan dukungan kepada rezim agar tetap mampu bertahan.

AS memiliki kepentingan dalam melemahkan atau memutuskan hubungan dekat antara Teheran dan Damaskus. Tentu saja, AS harus mengelola strateginya dengan baik agar rencana itu berhasil. AS telah mengembangkan strategi lain di Suriah. Ia telah melatih dan mempersenjatai militer garis kelompok-kelompok anti pemerintah Suriah,

dimana Pusat Operasi Militer (MOC), yaitu pusat operasi gabungan dengan Israel, Arab Saudi, Turki, dan Yordania telah melatih, mengelola, mempersenjatai, dan membayar gerakan pemberontak dan teroris untuk menghadapi tentara Suriah dan sekutu seperti Iran, Rusia, Hizbullah dan milisi perlawanan lainnya. Sebagai imbalannya, Israel memberikan gaji dan bahan bakar serta merawat kelompok bersenjata anti-Suriah yang terluka di rumah sakit (Gross, 2019).

Konflik di Suriah sering digambarkan sebagai perebutan kekuasaan yang besar, dengan Rusia mendukung Assad dan Amerika Serikat mendukung pemberontak. Presiden Obama kemudian memerintahkan Badan Intelijen Pusat AS (CIA) untuk memberikan pelatihan militer kepada kelompok pemberontak di Suriah. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu para pemberontak melawan rezim Assad. Sejak itu, AS jelas menjadi pihak dalam konflik tersebut.

Pada tahun 2016, Presiden Donald Trump terpilih untuk menggantikan Presiden Obama. Awalnya, Trump telah mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut campur dalam konflik Suriah dan bahwa Presiden Assad memiliki hak untuk memerintah Suriah. Pernyataan ini jelas bertentangan dengan pernyataan Presiden Obama. Namun, segera Trump berubah posisi dan melanjutkan dukungan pada pemberontak Suriah. Amerika Serikat era Trump telah melancarkan serangan udara di pangkalan udara Suriah. Serangan militer ini menandai awal dari konflik bersenjata di Suriah, ketika Amerika Serikat melakukan intervensi militer secara langsung ke Suriah untuk pertama kalinya. Serangan ini juga disebut oleh Amerika Serikat sebagai serangan terbatas, yaitu serangan terbatas pada target yang terkait dengan penggunaan senjata kimia yang dituduhkan kepada rezim.

Inggris, Perancis dan sekutu regional mereka seperti Arab Saudi, Lebanon, Yordania dan Qatar bergabung dengan koalisi pimpinan AS untuk agenda penggulingan Assad ini dan mereka secara terbuka mendukung oposisi dalam perang melawan Assad. Pada 2013, mereka menghabiskan \$60 juta untuk mendanai operasi ofensif di Suriah. Selain itu, mereka aktif di PBB dalam mencari sanksi hukum internasional terhadap Suriah melalui posisi masing-masing di PBB. Dalam artikel riset Yulianti & Sumadinata (2018) disebutkan bahwa AS pernah mengeluarkan dana sebesar 2,2 miliar US Dollar untuk membeli senjata dari Eropa timur yang kemudian disalurkan kepada para teroris di Suriah. Kementerian Pertahanan AS terbukti telah membeli senjata dari Eropa timur melalui SOCOM (Special Operations Command) dan the Picatinny Arsenal (fasilitas senjata militer AS di New Jersey) kemudian dikirim ke Turki, Yordania, dan Kuwait, lalu disalurkan kepada milisi-milisi proksinya di Suriah utara dan selatan.

Kepentingan Nasional Turki

Turki memiliki kepentingan nasional yang sifatnya ideologis, yaitu menginginkan adanya pemerintahan reformasi di Suriah yang memberikan kekuasaan kepada Ikhwanul Muslimin (IM). Awalnya, Ankara menyampaikan tuntutan melalui upaya dialog, agar Assad mengakomodasi IM. Namun, setelah Assad menolak, Turki mengerahkan upaya pemaksaan, melalui embargo, pembatalan perjanjian perdagangan, dan memberikan dukungan kepada milisi ekstremis *Free Syrian Army*. Turki juga menjadi tuan rumah dalam pendirian kelompok oposisi Dewan Nasional Suriah (SNC). Namun, seiring dengan dinamika konflik bersenjata, sejak tahun 2015 milisi Kurdi YPG di sepanjang perbatasan Suriah-Turki menjadi semakin kuat dan hal ini dipandang sebagai ancaman bagi Turki. Turki melihat gerakan separatis Kurdi (baik di dalam negerinya maupun di perbatasan Suriah) memberikan ancaman bagi keamanan nasional Turki. Oleh karena itu, Turki pun melakukan serangan militer langsung ke dalam wilayah Suriah untuk menyerang milisi Kurdi, antara lain pertempuran di utara Aleppo (2016), Afrin (2018), dan daerah antara Ras al Ain dan Tel Abyad (2019) (Van Veen, 2021, hal. 4-5).

Turki juga berperang langsung melawan tentara nasional Suriah yang ingin mengambil alih kembali Idlib. Serangan Turki tersebut dilakukan dalam Operasi Perisai Musim Semi (2020). Perang ini dilakukan Turki karena bila Idlib dikuasai oleh tentara nasional Suriah, maka akan terjadi gelombang pengungsian milisi ekstremis beserta keluarga mereka, masuk ke Turki. Bagi Turki, posisi status quo, dimana Idlib menjadi tempat akumulasi milisi ekstremis dan para pengungsi akan lebih baik. Untuk kepentingan ini, Turki merangkul kembali FSA dan berbagai milisi ekstremis lainnya untuk membentuk Tentara Nasional Suriah (*Syrian National Army-SNA*) dengan tujuan melawan tentara nasional resmi Suriah (*Syrian Arab Army-SAA*). Selain itu, Ankara juga melakukan pendekatan kepada milisi HTS dengan maksud untuk mengkooptasi, namun berdampak pada semakin menguatnya HTS di Idlib utara (Van Veen, 2021: 5-6).

Kepentingan Nasional Iran dan Rusia

Iran berusaha untuk mempertahankan Bashar Al Assad sebagai pemimpin Suriah dan membantu Assad melawan para pemberontak yang berafiliasi dengan ISIS dan Al Qaida. Iran berjuang untuk membantu Suriah karena keduanya memiliki kepentingan yang sama yaitu melawan kepentingan Israel, sekutu AS, dan membantu perjuangan Palestina. Bagi Iran, Suriah memiliki kepentingan strategis. Pemerintah Rezim Assad telah memberikan akses penting kepada milisi-milisi pejuang anti-Israel, yaitu Hizbullah Lebanon, Hamas, dan Jihad Islam Palestina. Suriah menginginkan Iran untuk

memindahkan orang, senjata, dan uang ke kelompok-kelompok ini melalui wilayah Suriah. Selain itu, Suriah telah menjadi mitra strategis Iran dalam mencegah Israel menyerang Iran. Strategi Iran di Suriah bertujuan untuk menjaga agar Presiden Bashar Assad tetap berkuasa. Dalam mencapai kepentingan ini, Iran melakukan upaya yang ekstensif, mahal, dan terpadu; antara lain mengirim misi penasehat dan bantuan untuk mendukung pasukan nasional Suriah (*Syrian Arab Army*). Dalam misi ini, Iran mengirimkan pasukan The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), dengan tokoh utamanya Jenderal Qassem Suleimani dan Mohsen Chizari (Fulton, et.al., 2013).

Sementara itu, dukungan Rusia kepada Suriah merupakan warisan dari sejarah panjang hubungan baik kedua negara. Di era Perang Dingin, Suriah memiliki kerja sama militer dengan Uni Soviet, di mana Rusia diberi akses ke pelabuhan Suriah Tartus sejak tahun 1971. Mantan Presiden Suriah Hafez Al-Assad, ayah Presiden Bashar Al-Assad, pernah belajar di sekolah penerbangan militer di Uni Soviet. Pada 1980-an, Rusia mengirim pasukan untuk mendukung pemerintah Suriah selama perang Lebanon. Dalam perang Suriah, Rusia telah memberikan berbagai bantuan, antara lain, bantuan militer, udara, militer, pelatihan dan dukungan diplomatik sehubungan dengan pembicaraan damai di PBB dan juga di Timur Tengah (Lain & Sutyagin, 2016: 17).

Dalam melawan milisi-milisi pemberontak dan teroris, Rusia terjun langsung membantu secara militer. Antara lain, Rusia membantu SAA (tentara nasional Suriah) dalam merebut kembali Palmyra dari tangan ISIS, juga memberikan dukungan penting kepada Iran dan Hizbullah dalam berbagai pertempuran melawan ISIS dan milisi-milisi afiliasi Al Qaida. Baik Rusia maupun Iran memiliki satu kepentingan nasional yang sama, yaitu mempertahankan kekuasaan Assad dan mencegah pemerintahan Suriah. Rusia juga punya kepentingan besar untuk mempertahankan akses militer ke Mediterania, mempertahankan pengaruhnya atas Suriah, dan membangun kembali pengaruhnya di kawasan yang lebih luas dan arena internasional. Jika kekuasaan di Suriah jatuh ke tangan pemerintahan yang anti-Rusia (pro-AS), pengaruh Rusia di Timur Tengah akan berkurang dan Rusia akan kehilangan satu-satunya sekutunya di kawasan ini, yang memberikan tempat bagi pangkalan militer Rusia, yaitu pangkalan angkatan laut Tartus dan pangkalan udara Khmeimim (Lain & Sutyagin, 2016: 17).

Ketika Suriah, Iran, dan Rusia berupaya mengambil alih Idlib, Rusia dan Turki mengadakan negosiasi terpisah. Rusia berusaha membujuk kelompok oposisi yang didukung Turki di Idlib untuk menyerah kepada rezim Assad. Lalu, Rusia memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Turki dalam rangka mengurangi ketegangan di Idlib dengan tanpa melakukan serangan militer. Rusia dan Turki menyetujui nota kesepahaman tentang Idlib berjudul Perjanjian Sochi 2018 pada bulan September. Di antara isi perjanjian adalah membuka kembali dua jalan raya utama yang

menghubungkan Aleppo ke pantai Suriah dan Damaskus, yang melewati medan yang dikuasai oleh milisi-milisi proksi Turki. Turki dan Rusia sama-sama mencari keuntungan ekonomi di sepanjang rute ini (Institute for the Study of War, 2020).

Kepentingan Nasional Suriah Atas Idlib

Pembahasan terpenting tentu saja kepentingan nasional Suriah. Provinsi Idlib adalah bagian dari negara Suriah dan seperti dikatakan oleh Morgenthau, negara memiliki kewajiban untuk melindungi identitas fisik, politik, dan kebudayaan negara tersebut dari gangguan negara lain. Bagi negara, keamanan nasional merupakan hal yang paling utama dan harus dipertahankan dengan kekuatan penuh. Kondisi bahwa Idlib dikuasai oleh milisi-milisi bersenjata anti-pemerintah dan melakukan serangan-serangan bersenjata kepada militer nasional Suriah, serta keberadaan militer Turki yang juga melakukan serangan kepada SAA, jelas bertentangan dengan kepentingan nasional Suriah.

Konflik-konflik yang dihadapi Suriah selama ini juga merupakan dampak dari upaya menjaga kepentingan nasionalnya. Antara lain, konflik Israel-Suriah terjadi karena Suriah memandang bahwa Israel telah mengancam kedaulatan negaranya (ada bagian wilayah Suriah yang diduduki Israel hingga kini, yaitu Golan). Kedua negara pernah terlibat dalam perang langsung, seperti Perang Arab-Israel 1948, Perang Enam Hari 1967, dan Perang Yom Kippur 1973. Selain konflik eksternal, Suriah juga menghadapi konflik internal. Antara lain, faksi Ikhwanul Muslimin Suriah telah melakukan pemberontakan berdarah di kota Hama untuk menyingkirkan Hafez al-Assad dari kursi kepresidenan Suriah. Upaya pemberontakan dimulai pada tahun 1976 dan puncaknya pada tahun 1982 yang dibalas pemerintah dengan melakukan serangan balik yang merenggut nyawa antara 5000-25.000 orang. Pada masa Arab Spring, Ikhwanul Muslimin Suriah merupakan aktor penting dalam pemberontakan melawan Bashar Assad.

Pada tahun 2000, Bashar al-Assad terpilih sebagai presiden setelah kematian ayahnya Hafez, dan tidak ada konflik besar di Suriah hingga awal 2011. Konflik bersenjata dimulai pada tahun 2012 ketika milisi bersenjata yang berafiliasi dengan Al Qaida (Jabhat Al Nusra) melakukan serangan-serangan kepada pihak pemerintah. Selanjutnya muncul berbagai milisi bersenjata, baik yang berafiliasi dengan Al Qaida, ISIS, maupun FSA. Mulai September 2015, Rusia melakukan operasi militer untuk membantu militer Suriah melawan milisi-milisi ekstrem antipemerintah dan secara dramatis mengubah 'keseimbangan kekuatan' di Suriah, dimana sebelumnya militer Suriah kesulitan dalam melawan milisi-milisi tersebut. Dalam serangan tersebut, Jabhat

Al Nusra sering menjadi sasaran, khususnya di Idlib, Hama, dan Aleppo. Mulai awal Februari 2016, pasukan pro-Assad telah memenangkan beberapa kemenangan di Aleppo utara dan selatan, Daraa, dan Hama (Lister, 2016). Provinsi Idlib pun menjadi tempat evakuasi para milisi dan pengungsi pro-milisi.

Mulai April 2019, militer Suriah mulai melakukan serangan untuk mengambil kembali kendali atas Idlib, didukung oleh serangan udara Rusia. Dari 28 April sampai 28 Mei, Suriah dan Rusia menyerang basis para milisi di Idlib, Hama, dan Aleppo. Atas serangan ini, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang pada 17 Mei 2019, dan dalam sidang itu, Duta Besar Rusia untuk PBB menolak tuduhan bahwa mereka menyerang objek sipil dan infrastruktur sipil. Rusia menyatakan bahwa mereka menyerang teroris. Pada bulan Juli 2019, dalam surat kepada Sekjen PBB pemerintah Suriah menyatakan bahwa 119 fasilitas kesehatan di Idlib digunakan oleh milisi-milisi teroris itu sehingga itu bukan lagi objek sipil dan sah untuk diserang secara militer. Serangan aliansi Suriah, Rusia, dan Iran terus berlanjut hingga Desember 2019, sehingga mereka bisa mengambil alih sejumlah kota di provinsi Aleppo, termasuk Khan Sheikoun yang merupakan jalur sangat strategis (Human Rights Watch, 2020).

Dalam pertarungan merebut kembali Idlib, kepentingan nasional dan keamanan Suriah dipertaruhkan. Penetapan prioritas di bidang keamanan rupanya menyingkap masalah yang multi-dimensional dan berlarut-larut. Atas alasan inilah yang menjadi urgensi Assad untuk sesegera mungkin mengambil alih kembali Idlib dari tangan pemberontak. Perjanjian demi perjanjian telah dibuat, yaitu menghentikan dan mengurangi penggunaan militer secara besar-besaran di zona yang sudah ditetapkan sebagai deeskalasi. Namun, serangan dari kelompok militan, plus serangan militer Turki, membuat upaya deeskalasi itu tidak berhasil. Kondisi konflik yang berlarut-larut ini membuat kondisi kemanusiaan di Idlib memburuk. Penduduk asli provinsi Idlib sekitar 1,5 juta penduduk dan kemudian meningkat dua kali lipat selama konflik Suriah menjadi sekitar 2,5-3 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2 juta orang dalam kondisi membutuhkan bantuan kemanusiaan, terutama pangan (Van Veen 2021).

Dalam kondisi seperti ini, kepentingan nasional Suriah ada tiga, yaitu mempertahankan kedaulatan wilayahnya, mempertahankan keamanan warga negaranya, serta mempertahankan identitasnya. Secara umum, kepentingan nasional Suriah berjalan seiring dengan kepentingan Rusia dan Iran, namun sebaliknya, berlawanan dengan kepentingan AS dan Turki. Pertarungan antarkepentingan nasional ini membuat konflik di Idlib terus berlarut-larut dan tidak bisa diprediksi kapan dapat diselesaikan.

Simpulan

Konflik Suriah yang bermula sejak era Arab Spring 2011 pada hakikatnya merupakan pertarungan antara dua kubu kepentingan nasional. Di satu kubu, AS, Eropa, Turki dan sekutu Arab Teluknya merupakan pihak yang anti Assad. Mereka dipersatukan oleh misi yang sama, yaitu menggulingkan pemerintahan Assad dan mereka melakukan pengerahan berbagai bantuan, mulai dana sampai dengan proksi militer untuk mencapai tujuan mereka. Mereka melakukan berbagai upaya, mulai dari penyusupan demonstran bersenjata pada peristiwa Dara'a, sampai dengan pengiriman bantuan dana dan senjata kepada milisi pemberontak di konflik-konflik Suriah. Turki, selain melakukan intervensi langsung terkait konflik di Idlib, Turki juga bergerak melalui proksi milisi di Suriah, begitu pun dengan AS, Eropa, dan negara-negara Teluk. Di kubu lain, dengan misi mempertahankan Assad dalam menempati kepemimpinan Suriah, Rusia dan Iran juga mengerahkan berbagai bantuan mulai dari logistik, ekonomi, dan militer.

Keterlibatan aktor-aktor negara asing dalam konflik Suriah dipastikan membawa kepentingan nasional mereka masing-masing. Perkembangan terakhir konflik ini adalah pertempuran di Idlib, yang merupakan provinsi terakhir di Suriah yang masih belum kembali ke tangan pemerintah Suriah. Idlib masih diduduki oleh milisi-milisi bersenjata yang didukung kubu anti-Assad. Upaya Suriah untuk mengambil kendali atas Idlib merupakan bagian dari kepentingan nasional Suriah, mencapai keamanan nasional serta menjaga kedaulatan wilayahnya. Kehadiran Rusia dan Iran untuk membantu mengalahkan para milisi pemberontak di tanah Suriah telah memungkinkan pemerintah Suriah meraih kembali kepentingan nasionalnya. Rusia dan Iran memiliki kepentingan nasionalnya sendiri. Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya di Suriah yang terwujud dalam keberadaan pangkalan militer di negara itu. Bagi Iran, mempertahankan pemerintahan Assad adalah demi mempertahankannya sekutunya dalam rangka melawan Israel.

Sementara itu, bagi AS, Suriah adalah musuh bersejarah dan ancaman. Banyak faktor sejarah yang memaksa Amerika menyingkirkan rezim Assad. Ini juga terkait dengan identitas Amerika sebagai kekuatan besar, pelindung Israel, dan pejuang demokrasi. Berbeda dengan kasus Suriah yang mengutamakan identitas pan-Arab, anti-Israel, dan anti-Barat. Benturan kepentingan nasional ini tentu saja menjadikan konflik ini terus berkepanjangan dan hanya dapat diselesaikan jika AS sebagai aktor utama yang sangat berkepentingan dalam menggulingkan Assad dapat menerima kepentingan nasional Suriah yang ingin mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya.

Aktor kuat lain yang memiliki kepentingan nasional tersendiri di Suriah adalah Turki. Negara ini memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan nasional dari ancaman

separatis Kurdi serta mencegah masuknya arus pengungsi dari Idlib ke wilayahnya. Meskipun Turki berhak menjaga keamanan nasionalnya, namun seharusnya itu dilakukan di wilayah Turki sendiri, bukannya menduduki wilayah Suriah. Selama Turki terus bertahan menduduki Suriah, konflik di Idlib juga akan terus berlarut-larut.

Daftar Pustaka

- Alatas, M. (2020). Geopolitik dalam Studi Perbatasan Suriah-Turki. *Jurnal ICMES*. Vol. 4. No. Hal. 86-102. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v4i1.74>
- Alkharpotly, B. (2019). Northern Syria: Activists and civilians between reality and need. Heinrich Boll Stiftung. Dalam: https://lb.boell.org/sites/default/files/2019-12/Idlib%20Research_English.pdf [Diakses 15 Desember 2022]
- Clinton, W. David. (1994). *The two faces of national interest (Political Traditions in Foreign Policy Series)*. Louisiana: Louisiana State University Press
- Fulton, Will., Holliday, Joseph., Wyer, Sam., (2013). Iranian Strategy in Syria. [online] *Understanding War*. Dalam: <https://www.understandingwar.org/sites/default/files/IranianStrategyinSyria-1MAY.pdf> [Diakses 13 September 2022]
- Gross, Judah Ari. (2019). IDF chief finally acknowledges that Israel supplied weapons to Syrian rebels. *Times of Israel* [online] Dalam: <https://www.timesofisrael.com/idf-chief-acknowledges-long-claimed-weapons-supply-to-syrian-rebels/> [Diakses 15 Oktober 2022]
- Harmiyati. (2018). Konflik Internal Suriah Dan Upaya Penyelesaian Damai. *Jurnal Paradigma* [online] 17(2), 1-7. Dalam: <https://doi.org/10.31315/paradigma.v17i2.2420> [Diakses 10 September 2022]
- Herlambang, A. dan Wulan, S.R. (2020). Dinamika Konflik Internal Di Suriah Dibawah Kepemimpinan Hafez Al-Assad Yang Berdimensi Internasional. *Jurnal Transborder*, Vol. 4 No. 1.
- Human Rights Watch. (2020). Targeting Life in Idlib: Syrian and Russian Strikes on Civilian Infrastructure. Dalam: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/syria1020_web.pdf. [Diakses 15 Desember 2022]

- Institute for the Study of War. (2020). The Crisis in Idlib The Prepared Testimony of Jennifer Cafarella before the U.S. House of Representatives Committee on Foreign Affairs, Subcommittee on Middle East, North Africa, and International Terrorism. Dalam: <https://www.jstor.org/stable/resrep29378> [Diakses 10 September 2022]
- Lain, S., & Sutyagin, I. (2016). The View From Moscow . Dalam A. B. Tabrizi, & R. Pantucci, ed. , *Understanding Iran's Role in the Syrian Conflict*. London: Royal United Services Institute, 17
- Lister, Charles. R. (2016). Profiling Jabhat al-Nusra. Center for Middle East Policy at Brookings. [Diakses 10 Desember 2022]
- Mudore, S. B., & Safitri, N. N. (2019). Dinamika Konflik Suriah: Aktor dan Kepentingan. *POLITEA Jurnal Kajian Politik Islam* [online] 2(2), 67-92. Dalam: <file:///C:/Users/Ayu%20Lestari/Downloads/assazali,+4.+dinamika+perang+suriah.pdf> [Diakses 10 September 2022]
- Nurhaliza, M. E. (2019). Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Israel Pada Masa Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan Pada Tahun 2014-2018. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. [online] Dalam: <http://digilib.uinsby.ac.id/31436/> [Diakses 12 Oktober 2022]
- Salari, Ehsan Taghizadeh., Amiri, MZ., Bavand, DH., Barzegar, Kayhan., (2022). Syrian Crisis: An Analysis of Political and Security Strategies of Involved Actors . *International Journal of Political Science* [online] 12(1), 105-122. Dalam: https://journals.iau.ir/article_694512_01cd173bfd216de500e008b4fe8e7b9a.pdf [Diakses 14 Oktober 2022]
- Salaymeh, B., & Acun, C. (2018). Perspective Sochi Agreement: Implications on the Ground And Upcoming Challenges. [online] SETA Dalam: <https://www.setav.org/en/perspective-sochi-agreement-implications-on-the-ground-and-upcoming-challenges/> [Diakses 12 Oktober 2022]
- UNDP. (2021). Human Development Report. United Nations Development Programme. [online] Dalam: <https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/SYR> [Diakses 12 Oktober 2022]
- Yulianti, D. dan Sumadinata, R.W.S. (2018). Terorisme di Suriah dan Implementasi *the Arms Trade Treaty*. *Jurnal ICMES* Vol. 2 no. 1, hal. 1-24
- Van Veen, E. (2021). Turkey's interventions in its near abroad: The case of Idlib. Policy Brief, Clingendael Institute.